

KASUS SURAT GUBERNUR UNTUK MINTA UANG, OMBUDSMAN SARANKAN KEMENDAGRI BERTINDAK

Rabu, 25 Agustus 2021 - Marisya Fadhila

Langgam.id - Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) menilai Kemendagri perlu bersikap soal polemik surat bertandatangan Gubernur Mahyeldi yang digunakan untuk minta uang penerbitan buku. Hal itu diperlukan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

"Sepertinya dengan kondisi yang gempar di nasional, tentu ada proaktif dari Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti ini, sehingga suasana akan clear," ucap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani di kantornya, Selasa (24/8/2021).

Menurutnya, pemerintah daerah khususnya Gubernur Sumbar harus memberikan keterangan yang lebih rinci terkait surat itu yang jadi polemik itu. Dia menilai penjelasan dari Mahyeldi akan memudahkan Kemendagri dalam menentukan sikap.

"Terkait dengan tindakan yang dilakukan Gubernur, apa tindakan dan sikap yang dilakukan akan kita serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Diketahui, persoalan surat bertanda tangan Mahyeldi ini masih dalam penyelidikan Polresta Padang. Surat tersebut digunakan oknum non pegawai pemerintahan untuk meminta uang ke pengusaha hingga kampus.

Polisi telah memeriksa sebanyak 10 orang dalam kasus ini. Para saksi yang diperiksa ini termasuk Sekdaprov Sumbar, Han Sastri.

"Sudah sekitar sembilan sampai 10 orang saksi yang BB telah kami periksa. Mulai dari lima orang yang menggunakan surat, pihak Bappeda hingga Sekdaprov," kata Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda dihubungi langgam.id, Senin (23/8/2021). (Mg Afdal)